

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS AHP DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alika Fauziah Arrozaq ¹, Tania Zulhaidha ², dan Vina Febrianty ³

¹²³⁴ Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ¹20110119@poltek.stialanbandung.ac.id,

²20110144@poltek.stialanbandung.ac.id, ³20110147@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi isu strategis yang terus diupayakan Pemerintah, karena angka kemiskinan tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional. Faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini disebabkan oleh rendahnya kualitas hidup masyarakat yang menyebabkan produktivitas hidup menurun dan kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Permasalahan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi acuan dan tantangan untuk pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, karena program-program pengentasan kemiskinan yang dalam pelaksanaannya sering kali terjadi penyimpangan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), untuk memilih alternatif solusi permasalahan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan pemahaman terkait strategi penganggulangan kemiskinan agar pemerintah terus memberikan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui program-program pemerintah, yang nantinya akan bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia.

Kata Kunci: kemiskinan; perlindungan sosial; masyarakat; yogyakarta; AHP

Poverty Reduction Efforts Using the AHP Analysis Method in the Special Region of Yogyakarta

Abstract

*The poverty rate in the Special Region of Yogyakarta is still a strategic issue that the Government continues to pursue, because the poverty rate is still relatively high when compared to the national poverty rate. The factors causing the high poverty rate in the Special Region of Yogyakarta are caused by the low quality of life of the community which causes decreased productivity of life and lack of employment opportunities which causes income inequality. The problem of poverty in the Special Region of Yogyakarta has become a reference and challenge for the government in efforts to reduce poverty, because poverty alleviation programs in their implementation often occur deviations. This study was analyzed using the AHP (*Analytical Hierarchy Process*) method, to choose alternative solutions to poverty problems in the Special Region of Yogyakarta. This research results in an understanding of poverty alleviation strategies so that the government continues to provide poverty reduction efforts through government programs, which will later serve as examples for other regions in Indonesia.*

Keywords: *poverty; social protection; society; yogyakarta; AHP*

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang penting untuk dapat dilihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Beberapa daerah mempunyai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan bisa menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah tersebut, rendahnya kualitas hidup yang menyebabkan produktivitas rendah dan kemiskinan tinggi. Produktivitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang dibawah minimum sehingga masyarakat miskin tidak bisa atau tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Tingkat kemiskinan yang terjadi pada salah satu provinsi yang ada pada negara Indonesia yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tinggi nya suatu angka kemiskinan yang berada di DIY yang dikeranakan sumber daya dan lapangan pekerjaan yang dimiliki sangat terbatas. Menurut BPS (2020), pada tahun 2019 Provinsi DIY yang memiliki tingkat kemiskinan nomor 1 di Pulau Jawa dan urutan ke 12 dari seluruh provinsi yang berada wilayah Indonesia. Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan oleh penerimaan bantuan yang tidak akurat sehingga bantuan dari pemerintah dan sasaran yang belum tepat, dapat menyebabkan angka penurunan kemiskinan ini menjadi lambat.

Jumlah penduduk yang menjadi permasalahan mendasar bagi kemiskinan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak teratur yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai, sehingga hal tersebut memiliki pengaruh antara pertambahan jumlah penduduk terhadap kemiskinan (Sukidin, 2017).

Faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat angka kemiskinan naik yaitu upah. Kerana pendapatan penduduk yang tidak menentu, yang disebabkan sulit nya lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat DIY. Berbagai solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi angka kemiskinan yang erus menurun naik yaitu dengan cara melalui peningkatan pendapatan.

Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di DIY yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil
4. Menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antar kabupaten
5. Kebijakan penetapan sasaran dengan menggunakan metode dan daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sama
6. Kebijakan berkaitan program-program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan
7. Kebijakan pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan agar dapat diketahui dan ditindaklanjuti dimasa datang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan kemiskinan sehingga dapat diperoleh suatu kebijakan yang tepat dan efektif.

B. PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan isu yang sangat dinamis dan bergantung pada jaman ataupun keadaan sedang yang terjadi. Di Indonesia, setiap pemerintah memiliki fokus dan karakteristik masing-masing dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan daerah yang dapat dikatakan sulit untuk menurunkan angka kemiskinan, banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Tercatat penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY mengalami peningkatan sebesar 5.500 dengan total penduduk miskin menjadi 358.660 orang. Dari hasil perhitungan Susenas pada bulan Maret tahun 2021, garis kemiskinan di Yogyakarta berada pada angka Rp. 482.855 per kapita (perbulan).

Pemerintah sendiri sudah berupaya untuk menurunkan angka tersebut dengan menggunakan strategi utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pertama, yaitu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan social dan subsidi. Kedua, yaitu melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dari kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan ekonomi.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

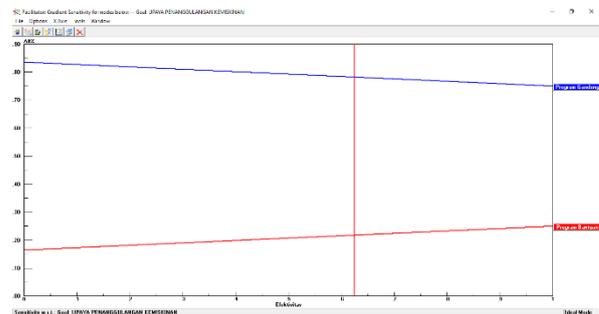
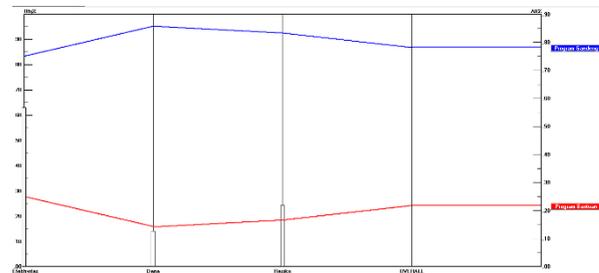
Berdasarkan **Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan** yang tercantum pada Bab II Pasal 5 yaitu *"Setiap penduduk miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Maka dari itu, untuk mengetahui program mana yang berhasil menekan angka kemiskinan di Yogyakarta, kami menggunakan Metode Analisis Hirarki Proses (AHP). AHP sendiri merupakan sebuah prosedur yang berbasis matematis dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif (Saaty, 1990). Atribut yang dimaksudkan adalah alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan yang menjadi bahan pertimbangan terhadap masalah yang dikaji. Atribut ini pada umumnya berbentuk kualitatif yang kemudian ditransformasi menjadi bentuk kuantitatif dalam satu set matriks dengan banding secara berpasangan.

Kami memilih menggunakan Metode Analisis Hirarki Proses (AHP) karena alasan-alasan sebagai berikut :

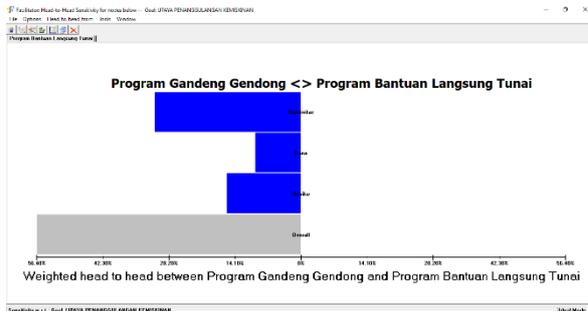
1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam.
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.
4. Konsistensi, AHP dalam melakukan penilaian prioritas dengan mempertimbangkan konsistensi logis
5. Sintesis, AHP mengarah perkiraan keseluruhan pada setiap masing-masing alternatif.
6. Trade off, prioritas relatif faktor-faktor dipertimbangkan untuk mampu memilih alternatif terbaik sesuai dengan keinginan.
7. Penilaian dan Konsensus (Judgement And Consensus), metode AHP membolehkan tidak adanya konsensus, melainkan gabungan dari hasil penilaian berbeda

Dari hasil analisis terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, didapatkan data berupa sebuah hierarki dari alternatif program yang sudah dibuat, yang kemudian selanjutnya akan diolah menggunakan AHP, yaitu sebagai berikut :



PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**



Alternatif yang menjadi prioritas utama setelah melakukan pengolahan menggunakan metode AHP yaitu Program Gandeng Gendong dengan nilai 0,782 lebih unggul dibandingkan dengan Program Bantuan Langsung Tunai dengan nilai 0,218.

Program Gandeng Gendong sendiri merupakan sebuah program yang dikeluarkan pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengentaskan kemiskinan di Yogyakarta, program ini muncul pada tahun 2018 dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 terkait program tersebut.

Kata gendeng sendiri bermakna bahwa semua elemen masyarakat saling bergadengan tangan dengan tujuan untuk saling membantu agar dapat maju Bersama, sedangkan kata gendong memiliki makna yang berarti masyarakat dapat membantu masyarakat lain yang tidak mampu berjalan agar dapat berjalan Bersama.

Sedangkan Program Bantuan langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah yang berjenis uang tunai atau bantuan lainnya, baik secara bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif tinggi salah satunya karena kurangnya kolaborasi dari masyarakat dan lembaga atau swasta lainnya dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya penanggulangan kemiskinan dari pemerintah terus diupayakan, dapat dilihat dari berbagai program yang telah berjalan hingga sekarang, salah satunya yaitu Program Gandeng-Gendong yang merangkul masyarakat untuk lebih mandiri

dalam meningkatkan kualitas hidupnya, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang membantu masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya sudah banyak program lain yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, namun belum membawa perubahan yang besar.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penanggulangan kemiskinan semestinya tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, tetapi juga melihat aspek lain seperti budaya, sosial, hukum dan religius. Maka dari itu, strategi yang semestinya dilakukan dengan memperhatikan aspek lain untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas masyarakat adalah dengan cara peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan serta melibatkan masyarakat miskin dalam proses penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Terlepas dari hal itu, dukungan dari pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan berbagai pihak kepentingan dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan upaya dan strategi penanggulangan kemiskinan.

REFERENSI

- Nugrahani, T. (2019). The effects of community empowerment and participation in the reduction of poverty: A case study on potorono and Wonokromo Bantul Villages. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(9), 87-108. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85075790410
- Saaty, T. (1990). How to make a decision: The analytic hierarchy process. *European Journal of Operational Research*, 48(1), 9-26. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(90\)90057-I](https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90057-I)
- Sambodo, M. T. (2019). The state of energy poverty in Indonesia and its impact on welfare. *Energy Policy*, 132, 113-121. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.05.029>
- Sukidin. (2017). A strategy of poverty alleviation in special region of Yogyakarta. *International*

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Journal of Economic Research, 14(6), 159–170.
https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85019548220

Wanto, A. (2020). Estimations of Indonesian poor people as poverty reduction efforts facing industrial revolution 4.0. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 725, Issue 1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/725/1/012114>

Wu, J. (2018). Poverty reduction through entrepreneurship: incentives, social networks, and sustainability. *Asian Business and Management*, 17(4), 243–259.
<https://doi.org/10.1057/s41291-018-0039-5>